

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN RAKYAT DI DESA DANGIANG, KECAMATAN CILAWU, KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT

***(Community Behaviour in Preservation Private Forest in Dangiing Village, Cilawu District,
Garut Regency, West Java Province)***

Rully Ahmad Awalludin¹, Messalina L Salampessy² dan Bambang Supriono³

¹Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Jakarta

e-mail : awalludin.rully@gmail.com

²Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa, Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah
Sereal, Kota Bogor, 16166, Indonesia;

e-mail : meisforester76@gmail.com

³Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa, Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah
Sereal, Kota Bogor, 16166, Indonesia;

ABSTRACT

The existence of the community forest in Dangiing Village, Cilawu District, Garut Regency, has supported efforts to conserve forests that are a buffer for people's lives. Sustainable community forest management is influenced by community behavior, as well as factors that support and hinder community efforts in preserving community forests. This study aims to examine the behavior of the community in an effort to preserve community forests and their supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study show that people's behavior is related to aspects of perception, participation, policy, cooperation, women's role, and cultural values / norms; Among them is maintaining the sustainability of community forests by planting, maintaining, and not carrying out activities that damage the forest. The community participates actively in the conservation activities. The supporting factors are the existence of local wisdom, active roles and community collaboration with stakeholders. The inhibiting factor is the economic function of the community forest which is still lacking, human resources are still low, and the accessibility of the area is inadequate. Utilization of community forest potential can increase community income through timber certification, identification of community forest products, increase collaboration between communities and stakeholders, and improve product yields in community forest areas.

Keywords: behaviors, community, private forest, SWOT analysis

ABSTRAK

Keberadaan hutan rakyat Desa Dangiing, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, telah mendukung upaya konservasi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya masyarakat dalam pelestarian hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat berkaitan dengan aspek persepsi, partisipasi, kebijakan, kerjasama, peran wanita, dan nilai/norma budaya; diantaranya adalah menjaga keberlangsungan hutan rakyat dengan menanam, memelihara, serta tidak melakukan kegiatan yang merusak hutan. Masyarakat ikut serta secara aktif dalam kegiatan pelestarian tersebut. Faktor pendukungnya yaitu adanya kearifan lokal, peran aktif, dan kerjasama masyarakat dengan *stakeholders*. Faktor penghambatnya yaitu fungsi ekonomi hutan rakyat yang dirasakan masih kurang, SDM masih rendah, dan aksesibilitas wilayah yang kurang memadai. Pemanfaatan potensi hutan rakyat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sertifikasi kayu, identifikasi produk hasil hutan rakyat, meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemangku kepentingan, dan meningkatkan hasil produk di kawasan hutan rakyat.

Kata kunci: perilaku, masyarakat, hutan rakyat, analisis SWOT

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, hutan di Indonesia menghadapi permasalahan serius yaitu degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan melalui hutan rakyat. Salah satu pola rehabilitasi lahan kritis secara vegetasi adalah dengan membangun hutan rakyat. Pembangunan hutan rakyat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan serta menunjang konservasi tanah dan air (Andayani, 1995).

Jumlah hasil hutan rakyat pada 2015 di Kabupaten Garut mencapai 14.546,458 m³ (BPS Kab. Garut, 2015). Namun pencapaian tersebut masih terkendala dalam hal optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik budidaya seperti pengaturan pola tanam, jarak tanam dan pemilihan jenis tanaman. Keberadaan hutan rakyat di Desa Dangiing didasari oleh pemikiran bahwa hutan rakyat menjadi sumber daya alam di daerah dataran tinggi, menjadi zona pengaman untuk mencegah erosi, dan sumber air alam yang harus dipelihara untuk melindungi aliran DAS Cimanuk. Desa Dangiing yang masuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Hulu yang merupakan DAS Prioritas I karena memiliki lahan kritis cukup rawan. Lahan kritis menjadi salah satu indikator suatu DAS mengalami degradasi (Paimin, *et al*, 2006).

Perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan rakyat adalah salah satu solusi dan model sosial yang dapat dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan bentuk nyata keikutsertaan masyarakat pelaksanaan pembangunan kehutanan yang memanfaatkan sumber daya

alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengkaji perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Dangiing; 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Dangiing; dan 3) menyusun rumusan strategi dalam upaya pelestarian hutan rakyat berdasarkan perilaku masyarakat di Desa Dangiing.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian di Desa Dangiing, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juli 2017.

B. Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kuisioner/panduan wawancara, alat tulis, computer, *software Microsoft Excel*, kamera, serta masyarakat, dan perilakunya

C. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan metode *proporsionate random sampling*.

Tabel 1 Fenomena dan Indikator Penelitian

Fenomena	Indikator	Metode
Persepsi masyarakat tentang HR	a. Hutan rakyat b. Pentingnya kelestarian hutan rakyat	Wawancara
Persepsi masyarakat tentang kebijakan pelestarian HR	a. Peraturan tentang Hutan rakyat b. Penyuluhan HR c. Faktor pendukung dan penghambat	Wawancara dan dokumen
Perilaku Masyarakat Berkaitan dengan Aspek Sosial dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat	a. Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan Hutan Rakyat b. Kerjasama dengan pihak terkait c. Peran wanita dalam Pengelolaan HR d. Nilai/Norma berkenaan pengelolaan HR	Wawancara dan Observasi

Sumber : Nurhandayani dan Umar dalam Suryaningsih (2012)

D. Penentuan Responden

Penentuan sampel dipilih berdasarkan jumlah keanggotaan masyarakat di Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Cihanjuang Cilawu yang berjumlah 448 anggotamelalui metode *proporisonate random sampling* dan Slovin (Sevilla *et. al.*, 1960:182). Pertimbangan lain yang diambil yaitu ketersediaan dan kesediaan responden dalam merespon penelitian. Jumlah responden ditentukan sebanyak 82 responden (Rumus Slovin, Sevilla *et. al.*, 1960:182).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n	: Penentuan Sampel
N	: Ukuran Populasi
e	: Presentase ketidaktelitian pengambilan sampel (10%)

E. Analisis Data

Analisis *SWOT* dilakukan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Analisis ini dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki masyarakat serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), kemudian menentukan strategi-strategi yang dapat diterapkan. Penyusunan matriks internal dan eksternal bertujuan untuk memilih alternatif strategi yang sebaiknya dilakukan sehingga strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling tepat karena sesuai kondisi eksternal dan eksternal yang dimiliki oleh lingkungan kajian penelitian (Rangkuti, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Sejarah Hutan Rakyat

Kondisi desa sebelum ada kegiatan pengembangan hutan rakyat terdiri dari perbukitan tandus dengan kondisi lahan yang tandus, kering, berbatu dan hanya ditumbuhi

alang-alang atau iser-iser. Beberapa pohon tumbuh di sekitar alang-alang namun tidak terawat. Hampir setiap tahun terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir dari Sungai Cimanuk pada musim penghujan. Di musim kering, warga juga kesulitan mendapatkan air bersih. Lahan yang tersedia hanya ditanami singkong, sedangkan sawah hanya bisa panen dalam setahun 1 (satu) kali.

2. Profil Hutan Rakyat

Hutan rakyat dikembangkan masyarakat secara swadaya mulai tahun 2005 dan saat ini luasnya mencapai sekitar 80 Ha. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan milik masyarakat yang tersebar di 8 (delapan) kampung yaitu Kampung Sindang Daweung, Ciajag, Ciharus, Ciharus Girang, Kiara Janggot, Ciledug, Kulon, dan Lebak Wetan. Kampung-kampung tersebut berada pada lahan dengan kemiringan di atas 15° atau pada wilayah perbukitan. Di bawah kawasan hutan rakyat terdapat jalan yang biasa digunakan masyarakat sebagai akses untuk mengangkut hasil kayu maupun non kayu.

3. Karakteristik Responden

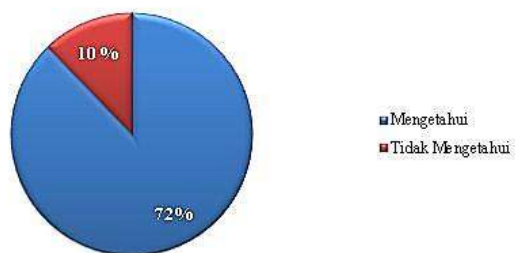
Masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan hutan rakyat didominasi oleh laki-laki dengan presentase 74%. Karakteristik usia masyarakat didominasi oleh rentang usia >45 tahun dengan persentase 59%. Status pernikahan masyarakat didominasi oleh status telah menikah dengan presentase 98%. Perolehan dari karakteristik pendidikan terakhir masyarakat di dominasi oleh SMP/MTs dengan presentase 41%. Masyarakat rata-rata memiliki pendapatan perbulan dengan rentang gaji yang didominasi oleh 1.000.000-3.000.000 dengan presentase 62%. Dominasi lain ditunjukkan pada karakteristik pekerjaan yang didominasi oleh petani/pedagang sayuran dengan presentase 77%. Masyarakat yang menganut agama Islam cukup besar, menjadikan karakteristik agama masyarakat di dominasi oleh Agama Islam dengan presentase 100%. Karakteristik lama tinggal masyarakat didominasi oleh >20 tahun dengan presentase 78%. Karakteristik

lahan hutan rakyat yang digarap masyarakat didominasi sebanyak >1,0 ha dengan jumlah 49 orang dengan presentase 59%.

4. Identifikasi Perilaku Masyarakat

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat tentang hutan rakyat dapat diketahui melalui bagaimana pengetahuan mereka tentang hutan dan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka. Dari 82 informan, 72 orang (88%) mengetahui tentang hutan rakyat dan 10 orang (12%) yang tidak tahu. Sebanyak 22% responden beranggapan bahwa hutan rakyat dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar masyarakat dan dapat mengatasi lahan kritis di kawasan lingkungan masyarakat tinggal. Sementara itu, 20% responden beranggapan bahwa hutan rakyat adalah lahan milik rakyat yang dikelola oleh masyarakat untuk mengatasi/mencegah bencana banjir.



Gambar 1 Pengetahuan masyarakat tentang hutan rakyat

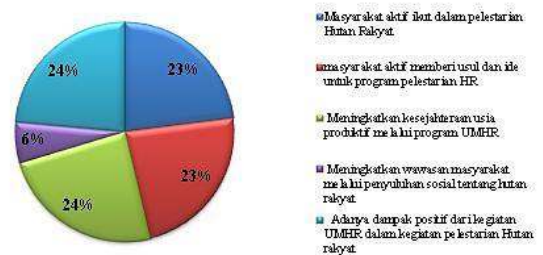


Gambar 2 Persepsi Masyarakat terhadap HR

b. Partisipasi Masyarakat

Sebanyak 24% responden berpendapat bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat melalui program UMHR maka, kesejahteraan pada usia produktif akan meningkat. Sebanyak 23% menjawab bahwa dengan adanya program UMHR, seluruh masyarakat ingin diikutsertakan dalam pengelolaan hutan

rakyat dan dengan presentase yang sama (23%), masyarakat beranggapan bahwa perilaku partisipatif mereka akan memberikan manfaat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.



Gambar 3 Partisipasi Masyarakat

c. Kebijakan

Kebijakan pengelolaan hutan rakyat yang menyangkut peraturan dan perundang-undangannya, sebanyak 36% informan berpendapat sangat setuju apabila diberlakukannya suatu peraturan yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan di desanya. Sebanyak 32% responden menyatakan bahwa kebijakan harus diberlakukan secara tegas dengan perkataan lain, masyarakat sangat antusias apabila terdapat penindakan terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan rakyat.

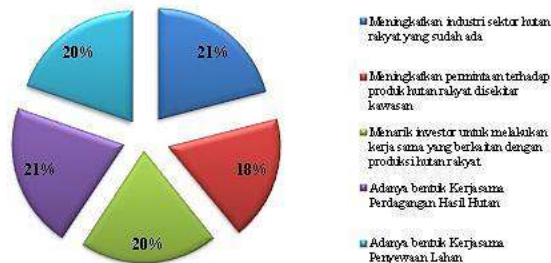


Gambar 4 Bentuk Kebijakan dalam Pelestarian HR

d. Kerjasama

Dalam pengembangan hutan rakyat, masyarakat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Sebanyak 21% responden beranggapan dengan adanya kerjasama dengan beberapa pihak dapat meningkatkan sektor industri hutan rakyat yang sudah ada dan meningkatkan kerjasama perdagangan hasil hutan. 20% responden memilih dengan adanya kerjasama bersama pihak luar kawasan maka akan menarik investor untuk

melakukan kerjasama yang berkaitan dengan produksi hutan rakyat dan akan timbulnya bentuk kerjasama penyewaan lahan sekitar masyarakat.



Gambar 5 Bentuk Kerjasama dalam Pelestarian HR

e. Peran Wanita

Sebanyak 34% dari keseluruhan responden beranggapan bahwa peran wanita akan memberikan dampak positif dalam kegiatan pelestarian hutan rakyat. Sebanyak 27% responden berpendapat peran wanita akan meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi masyarakat. Peningkatan hasil produksi yang dijumpai oleh peran wanita memang tidak serta merta sangat melonjak tetapi setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dan kelestarian hutan rakyat.

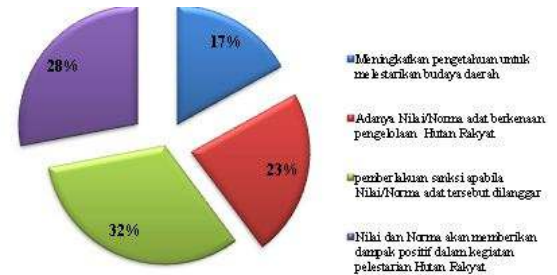


Gambar 6 Peran wanita dalam Pelestarian HR

f. Nilai/Norma Budaya

Sebanyak 32% responden beranggapan dengan adanya penerapan nilai/norma budaya akan memberikan efek jera bagi pelanggar khususnya sanksi apabila nilai/norma budaya yang terdapat di kawasan masyarakat

dilanggar. 28% responden memilih dengan adanya nilai/norma memberikan dampak positif dalam kegiatan pelestarian hutan rakyat.



Gambar 7 Pengetahuan Nilai/ Norma Masyarakat

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan kajian perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian hutan rakyat, dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya pelestarian hutan rakyat di antaranya :

Tabel 2 Faktor Pendukung dan Penghambat
Table 2 Supporting and inhibiting factors

Faktor pendukung	FaktorPenghambat
Partisipasi yang cukup tinggi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat	Kualitas pendidikan masyarakat yang relatif rendah
Unit Manajemen Hutan Rakyat/kelembagaan masyarakat yang mantap	Luasan lahan yang digarap masih dalam skala kecil (0,25 ha - 12 ha)
Usia produktif	Hutan rakyat masih menjadi pekerjaan sampingan masyarakat
Adanya Nilai/Norma dan kearifan lokal yang masih terjaga	Masyarakat masih memiliki keterbatasan koordinasi dengan berbagai pihak
Adanya Kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait	Akses sarana dan prasarana kelokasi masih sulit dijangkau
Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian HR cukup tinggi	Masyarakat masih memiliki kecenderungan terhadap bantuan berbagai pihak

Sumber (Source): Hasil Penelitian 2017

B. Pembahasan

1. Analisis Rumusan Strategi

Kajian perilaku serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dilakukan dan ditindaklanjuti dengan merumuskan strategi

dalam rangka pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan.

a. Atribut Penentuan Strategi

Atribut penentuan strategi yang akan dijadikan sebagai perumusan strategi dalam pelestarian hutan rakyat, diantaranya, melakukan pemilihan atribut dari kuesioner yang saling terkait antara *Strenght*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* (Tabel 3).

Tabel 3 Prioritas Strategi
Table 3 Strategy Priority

No	Aspek	Atribut	Kaitan	Bobot
1	Persepsi	Hutan Rakyat dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar	S1	0,11
2	Partisipasi	Masyarakat diikutsertakan dalam pelestarian HR	S2	0,10
		Adanya musyawarah masyarakat untuk merencanakan suatu program	S2, S3	0,10
		Meningkatkan kesejahteraan usia produktif melalui program UMHR	S4	0,11
		Adanya dampak positif dari kegiatan UMHR	S5	0,11
3	Kebijakan	Adanya dampak Positif dari kebijakan	O1, O2	0,23
		Pelaksanaan kegiatan HR akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat	W3	0,11
4	Kerjasama	Membuka peluang interaksi kerjasama dengan pihak lain	O4	0,09
		Meningkatkan ndustri sektor hutan rakyat yang sudah ada	O3	0,10
		Adanya bentuk Kerjasama Perdagangan Hasil Hutan	O5,O4	0,09
		Adanya dampak Positif dari kerjasama	O5	0,20
		Adanya dampak Negatif dari kerjasama	W4, T3	0,02
6	Peran Wanita	Peran Wanita dapat meningkatkan hasil produksi Hutan rakyat	W5	0,21
7	Pendidikan	Tingkat pendidikan SMP/MTs	W1	0,04
8	Luas Lahan	1,0 -12 Ha	W2, T4	0,01
9	Akses	Sangat Sulit	T1	0,02
10	T. Kerawanan	Sangat Rawan	T2	0,32

Sumber (Source): Hasil Penelitian 2017

b. Faktor analisis strategi Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS)

Faktor-faktor strategi internal dirumuskan dalam bentuk tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5. Faktor-faktor strategi eksternal kemudian diskoring dengan memberikan bobot dan rating seperti pada faktor EFAS dan dirumuskan dalam bentuk tabel EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*).

Tabel 4 IFAS (*Int. Strategic Factors Analysis Summary*)
Table4 IFAS (*Int. Strategic Factors Analysis Summary*)

Simbol	Internal	Bobot	Rating	Skor
	a. Kekuatan			
S1	• Kelembagaan yang mendukung	0,11	4	0,44
S2	• Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian HR cukup tinggi	0,10	4	0,4
S3	• Usia produktif masyarakat untuk menjalankan roda Pelestarian HR	0,11	3	0,44
S4	• Partisipasi masyarakat tinggi	0,11	3	0,33
S5	• Adanya dampak positif dari kebijakan dalam pelestarian HR	0,20	4	0,8
	b. Kelemahan			
W1	• Tingkat pendidikan yang rendah	0,04	2	0,08
W2	• Luasan lahan masih terbatas/kecil	0,01	2	0,02
W3	• HR masih menjadi mata pencaharian pokok	0,11	3	0,33
W4	• Kerjasama dengan pihak tertentu yang merugikan	0,02	2	0,04
W5	• Minimnya peran wanita dalam pemanfaatan HR	0,21	2	0,42
TOTAL		1,0		1,52

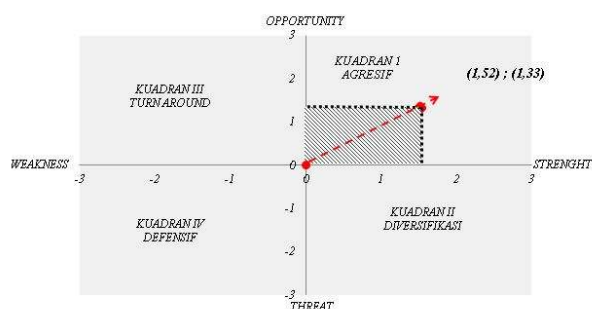
Sumber (Source): Hasil Penelitian 2017

Tabel 5 EFAS (Ext. Strategic Factors Analysis Summary)
 Table 5 EFAS (Ext. Strategic Factors Analysis Summary)

Simbol	Eksternal	Bobot	Rating	Skor
a. Peluang				
O1	• Bentuk kerjasama perdagangan hasil hutan	0,20	4	0,36
O2	• Sertifikasi hasil hutan	0,09	4	0,36
O3	• Adanya potensi hasil hutan non-kayu	0,10	3	0,3
O4	• Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan HR	0,23	3	0,6
O5	• Kebijakan pemerintah yang mendukung HR	0,23	2	0,4
b. Ancaman				
T1	• Aksesibilitas belum terjangkau shg pemasaran produk sulit	0,02	2	0,04
T2	• Letak desa yang rawan bencana	0,32	2	0,58
T3	• Adanya peran Tengkulak dalam pemasaran produk hasil kayu	0,02	2	0,04
T4	• Terbatasnya lahan hutan rakyat	0,01	3	0,03
TOTAL		1,0		1,33

Sumber (Source): Hasil Penelitian 2017

Terdapat 4 alternatif strategi yang dapat disarankan, yaitu strategi *SO*, *ST*, *WO* dan *WT* dan dirumuskan dalam bentuk matriks Berdasarkan model matriks internal-eksternal dari (Rangkuti, 2008), maka hasil dari strategi disajikan pada Gambar 4 dalam bentuk diagram SWOT. Alternatif strategi merupakan gabungan dari aktor-faktor internal dan eksternal.



Gambar 8 Diagram SWOT

Sumber (Source) : Hasil Penelitian 2017

Penentuan pilihan strategi upaya pelestarian hutan rakyat Desa Dangi Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut didasarkan pada analisis total skor faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, dengan nilai **total skor IFAS = 1,52** dan **EFAS = 1,33** tampak bahwa strategi yang dapat dipilih berada pada **kuadran I[(1,52),(1,33)]** yaitu strategi Agresif.

2. Pembahasan Strategi

a. Perilaku Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Rakyat

Keberadaan hutan rakyat di Desa Dangi disadari masyarakat menjadi salah satu potensi dalam mengembangkan kemajuan desa. Hal ini didukung oleh telah terujinya hasil hutan mereka melalui sertifikasi yang telah dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan setempat dan UMHR Cihanjuang. Masyarakat berharap bahwa hutan rakyat tersebut tetap dijaga, dilestarikan, tidak ditebang sembarangan, sehingga dapat menjadi hutan rakyat percontohan.

Masyarakat yang tergabung dalam UMHR juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UMHR (kegiatan internal) maupun diluar UMHR (kerjasama dengan pihak terkait). Masyarakat aktif dalam acara penyuluhan yang diadakan setiap 3 bulan sekali, lebih dari 75 % anggota hadir pada kegiatan tersebut (wawancara dengan pengurus dan anggota tanggal 17 Juni 2017). Materi penyuluhan seperti sosialisasi UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diberikan oleh penyuluh kehutanan Kecamatan Cilawu melalui BP3K diberikan namun masyarakat tidak begitu saja mengerti dan memahami materi tersebut, sehingga pemberian materi dilakukan berulang kali.

Kebijakan pengelolaan hutan rakyat yang menyangkut peraturan dan perundang-undangannya yaitu khususnya Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam UU pasal 1 tersebut

menyatakan bahwa hutan hak (lebih dikenal dengan hutan rakyat) adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Masyarakat mengetahui UU tersebut melalui penyuluhan, media massa, pengurus UMHR maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan instansi kehutanan. Penyuluhan dilakukan Penyuluh Kehutanan serta PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) yang terdiri dari Kepala Desa, UMHR di desa Dangi. Masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan/peraturan tentang hutan rakyat tersebut sangat bermanfaat khususnya mengenai pentingnya menjaga keamanan, dan kelestarian lahan hutan rakyat yang mereka garap.

Upaya kerjasama memajukan dan melestarikan hutan rakyat juga dilakukan Dinas Kehutanan setempat yaitu dengan telah mendukung dan merekomendasikan hutan rakyat di Desa Dangi untuk mendapatkan sertifikasi kayu hasil hutan rakyat. Sertifikasi hasil hutan rakyat berdampak positif bagi pengembangan hutan rakyat karena dengan sertifikasi maka ada legalitas akan kualitas produk kayu hutan rakyat terpenuhi serta meningkatkan daya tawar kayu tersebut.

Pelestarian hutan rakyat di desa tersebut tidak lepas dari peran perempuan. Dukungan ibu-ibu ini dapat dilihat pada keikutsertaan mereka dari tahap penanaman, dan pemasaran hasil hutan rakyat. Pada awalnya mereka membantu menanam bibit, melakukan pembibitan, serta menanam tanaman di bawah tegakan (singkong, dan umbi-umbian). Hasil dari hutan rakyat terutama singkong dan umbi, mereka jual ke pasar. Keterlibatan ini didominasi pada penanaman, dan pemasaran tanaman bawah tegakan.

Masyarakat memiliki nilai-nilai lokal atau norma mengatur tentang pelestarian hutan rakyat. Norma tersebut berisi larangan mengambil material dari dalam hutan, baik kayu maupun non-kayu dari kawasan hutan rakyat serta sanksi yang dikenakan apabila dilanggar. Norma-norma tersebut muncul karena kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan dan

lingkungan. Norma yang berlaku pada masyarakat tersebut kemudian seolah-olah mengikat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat

Berdasarkan kajian perilaku masyarakat, dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya masyarakat dalam pelestarian hutan rakyat.

Tabel 6 Faktor Pendukung dan Penghambat
Table 7 Supporting and inhibiting factors

Faktor pendukung	Faktor Penghambat
Partisipasi yang cukup tinggi masyarakat dalam upaya pelestarian HR	Kualitas pendidikan masyarakat yang relatif rendah
Unit Manajemen Hutan Rakyat/kelembagaan masyarakat yang mantap	Luasan lahan yang digarap masih dalam skala kecil (0,25 Ha-12 Ha)
Usia produktif	Hutan rakyat masih menjadi pekerjaan sampingan masyarakat
Adanya Nilai/Norma dan kearifan lokal yang masih terjaga	Masyarakat masih memiliki keterbatasan koordinasi dengan berbagai pihak
Adanya Kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait	Akses sarana dan prasarana kelokasi masih sulit dijangkau
Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian HR cukup tinggi	Masyarakat masih memiliki kecenderungan terhadap bantuan berbagai pihak

Sumber (Source): Hasil Penelitian 2017

c. Rumusan Strategi untuk Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Rakyat

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, dengan nilai **total skor IFAS = 1,52** dan **EFAS = 1,33** tampak bahwa strategi yang dapat dipilih berada pada **kuadran II(1,52),(1,33)** yaitu strategi Agresif. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*). Menurut Rangkuti (2009), strategi ini termasuk strategi pertumbuhan dengan cara memperluas, mengembangkan dan meningkatkan strategi pada SO (*Strength Opportunity*), diantaranya meningkatkan potensi sertifikasi kayu yang telah ada dengan bekerjasama melalui berbagai dukungan

pemangku kepentingan dalam pemanfaatan hutan rakyat, mengembangkan identifikasi dan inventarisasi potensi hasil hutan rakyat baik kayu maupun non kayu agar masyarakat lebih mengetahui keragaman hasil hutan rakyat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan menumbuhkan potensi kerjasama dengan para pemangku hutan rakyat dalam merekomendasikan dan merumuskan perencanaan peningkatan partisipatif masyarakat tentang hutan rakyat untuk menjadikan kawasan Hutan Rakyat yang produktif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perilaku masyarakat secara persepsi, partisipasi, kebijakan, kerjasama, peran wanita dan peran wanita secara umum sudah mendukung upaya pelestarian hutan rakyat
2. Faktor pendukung diantaranya partisipasi masyarakat cukup tinggi, peran kelembagaan yang mantap, peran usia produktif untuk meningkatkan kesejahteraan, Sedangkan faktor penghambat diantaranya fungsi hutan secara ekonomi dirasakan masyarakat masih kurang maksimal, kualitas SDM yang rendah, akses masuk wilayah desa dan luasan lahan yang kurang memadai, dan masyarakat masih memiliki kecenderungan dan keterbatasan koordinasi terhadap bantuan berbagai pihak.
3. Posisi hutan rakyat berada di situasi yang sangat menguntungkan. Peran hutan rakyat tersebut memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal dalam keberadaan hutan rakyat untuk memanfaatkan peluang yang ada.

B. Saran`

1. Menyusun rancangan pengembangan hutan rakyat Desa Dangiing dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada. Rancangan ini juga memuat potensi hutan rakyat menjadi kawasan hutan rakyat yang produktif.
2. Dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, instansi pemerintah dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk kegiatan yang dapat dikembangkan dalam hutan rakyat
3. Perlu adanya koordinasi dan mengusulkan kepada instansi terkait perbaikan sarana prasarana akan mempermudah akses masyarakat terutama dalam memasarkan hasil hutan rakyat serta perlu dilakukan inventarisasi potensi hasil hutan rakyat (kayu dan non kayu) dan, pemetaan wilayah potensi bencana (terutama banjir dan longsor).
4. Berkoordinasi instansi terkait dalam membentuk koperasi hutan rakyat untuk memberikan modal usaha rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Secara khusus diucapkan terimakasih kepada seluruh Staff Badan Pengelola Hutan Wilayah III Garut, Dadang Wandara, Tatang dan Awal Mulyadi atas bantuannya dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wahyu. 1995. Hutan Rakyat dan Peranannya dalam Pembangunan Daerah. *Majalah Kehutanan Indonesia*. No.6 Juni 1995
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. [BPS Kabupaten Garut] 2016. Garut dalam Angka <http://garutkab.bps.go.id> [diakses 26 Desember 2016]
- Hariyanto D, dkk. 2012. Pedoman Analisis Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan. Bogor: Puslitbang Kehutanan.

- Rangkuti, Freddy. 2009. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Paimin, Sukresno, Purwanto. 2006. *Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS)*. Bogor: Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Pengolahan Kayu Rakyat. [Skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Sevilla, Consuelo G. et. al (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Salampessy, M.,Nugroho, B., & Purnomo, H. (2012). Hubungan Karakteristik Responden dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Nona Di Kota Ambon Propinsi Maluku, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial danEkonomi Kehutanan*, IX(3), 149- 154.
- Suryaningsih, H, dkk. 2012. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Upaya PelestarianHutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Jurnal EKOSAINS. Volume IV No 3 November 2012. FISIP UNDIP
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan